

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur majunya suatu negara. Hal tersebut terjadi yaitu ketika perekonomian di negara tersebut selalu dalam keadaan yang lebih baik pada setiap periodenya sehingga dapat tercapainya keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi di negara tersebut (Zaizafun et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan selama periode tertentu. Peningkatan ini biasanya diukur dengan menggunakan indikator seperti produk domestik bruto (PDB). Dalam bahasa sederhana, pertumbuhan ekonomi berarti adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai produksi, pendapatan, atau kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah.

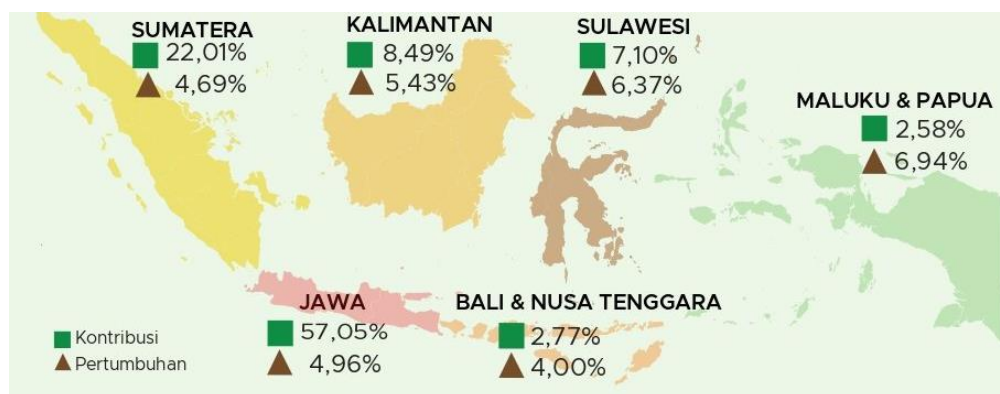
Konsep pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Keberhasilan dalam perekonomian merupakan prestasi dari perkembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi (Widyastuti & Nugraha, 2021). Pertumbuhan ekonomi selama ini menjadi sorotan dan perhatian utama yang terus berkelanjutan, dikarenakan keberhasilan suatu daerah dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Mulyani et al., 2021). Meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan pembangunan. Idealnya, semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang sama dan adil dari kemajuan. Karena hal ini

tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga membawa perubahan struktural yang besar, maka pembangunan ekonomi sangatlah penting dalam proses ini. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari pertumbuhan ekonominya (Wahyudi & Wahyudin, 2022). Hal tersebut menunjukkan adanya saling keterkaitan diantara keduanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Todaro (1999) (dalam Wahyudi & Wahyudin, 2022) bahwa pembangunan bukan hanya mencakup perubahan pada struktur sosial, perilaku sosial, dan pranata sosial, namun pembangunan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Sehingga tiap rancangan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh suatu wilayah salah satunya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berarti aktivitas perekonomian di wilayah tersebut akan menghasilkan peningkatan pada pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh wilayah, yang tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat tetapi juga mengurangi biaya logistik dan mendorong investasi. Pembangunan infrastruktur ini, seperti jalan tol dan fasilitas publik, telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Pulau Jawa, yang merupakan pusat ekonomi nasional. Dengan meningkatnya investasi dan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan

ekonomi di Pulau Jawa semakin kuat, didukung oleh sektor-sektor seperti transportasi dan perdagangan yang berkembang pesat. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing daerah, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia dan pusat perekonomian negara, berkat lokasi strategis, aksesibilitas, sumber daya alam, populasi besar, dan dukungan kebijakan pemerintah. Sebagai sentral pemerintahan, pembangunan di Pulau Jawa telah terkonsentrasi, menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan pulau lain. Hal ini menjadikan Pulau Jawa lebih maju dengan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga daerah-daerah di pulau ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ditopang paling besar dari PDRB Pulau Jawa.



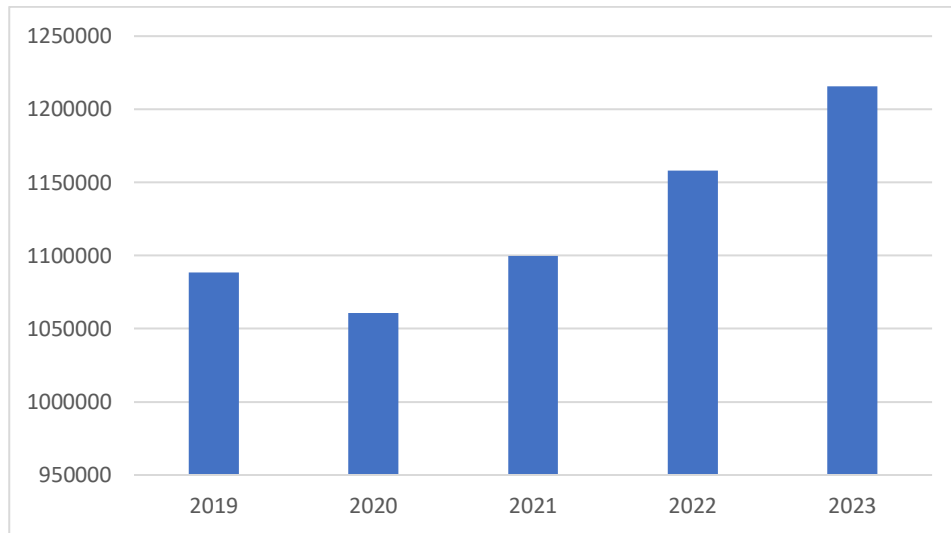
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1
Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Menurut Pulau (persen), 2023

Selama tahun 2023 perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus tumbuh. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2023 menurut kelompok pulau masih disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan kontribusi

sebesar 57,05 persen dan mencatat pertumbuhan 4,96 persen (Badan Pusat Statistik, 2024b).

Berikut gambar grafik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2023 dengan data pertumbuhan PDRB.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

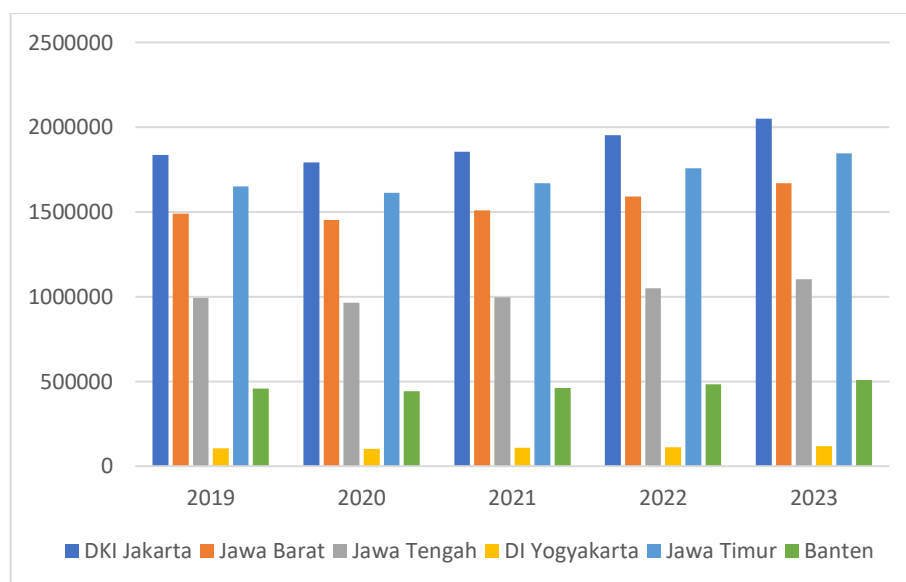
Gambar 1. 2

**Rata-rata Pertumbuhan PDRB 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023
(miliar rupiah)**

Rata-rata PDRB di Pulau Jawa selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mengalami penurunan pada tahun kedua, grafik memperlihatkan tren peningkatan yang cukup tajam hingga tahun terakhir. Penurunan pada tahun kedua dapat dikaitkan dengan adanya gangguan ekonomi, seperti dampak pandemi, yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi di wilayah ini. Namun, pemulihan ekonomi terlihat jelas pada tahun-tahun berikutnya, di mana pertumbuhan PDRB kembali meningkat secara konsisten. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Permasalahan yang muncul, seperti ketimpangan

pertumbuhan antarwilayah, ketergantungan pada sektor tertentu, serta tantangan dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global, menjadi alasan penting memilih pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebagai objek penelitian.

Berikut gambar grafik dari pertumbuhan PDRB pada 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2019-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1. 3
Pertumbuhan PDRB 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023
(miliar rupiah)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi, berdasarkan rata-rata dari 5 tahun terakhir provinsi dengan pertumbuhan PDRB terendah adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian selanjutnya diikuti oleh provinsi Banten dan Jawa Tengah.

Berdasarkan grafik yang menampilkan perkembangan PDRB di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya perbedaan yang

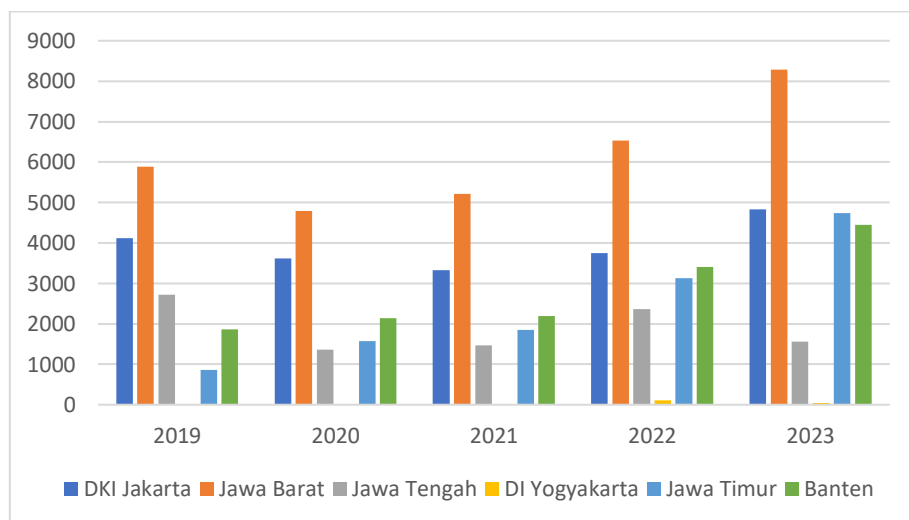
cukup mencolok antara masing-masing provinsi. DKI Jakarta secara konsisten menunjukkan nilai PDRB tertinggi setiap tahunnya, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara itu, provinsi seperti Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta memiliki nilai PDRB yang relatif lebih rendah. Selama lima tahun terakhir, hampir semua provinsi mengalami tren peningkatan PDRB, meskipun pertumbuhannya tidak merata. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sedangkan pertumbuhan di DI Yogyakarta dan Banten cenderung lebih lambat.

Terlihat pada grafik di atas bahwa adanya ketimpangan ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa. Ketimpangan ini terlihat dari selisih nilai PDRB yang cukup besar antara provinsi dengan PDRB tinggi dan provinsi dengan PDRB yang lebih rendah. Selain itu, pertumbuhan yang berbeda-beda menunjukkan bahwa tidak semua wilayah mampu berkembang secara optimal. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti kesenjangan pembangunan, perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta potensi migrasi penduduk ke wilayah dengan perekonomian yang lebih maju.

Perubahan dalam struktur ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi menjadi aspek penting dalam proses transformasi suatu negara menuju kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, ketersediaan sumber daya, serta peran investasi, turut memengaruhi dinamika perkembangan ekonomi tersebut. Dalam konteks ini, pergerakan modal baik dari dalam maupun luar negeri seringkali menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mempercepat laju perubahan ekonomi dan mendorong peningkatan produktivitas. Pemahaman

terhadap bagaimana berbagai faktor tersebut saling berinteraksi sangat penting untuk mengkaji proses pembangunan dan perubahan ekonomi secara menyeluruh.

Penanaman modal asing (PMA) memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Investasi asing tidak hanya menyediakan aliran modal yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga membawa teknologi baru, pengetahuan manajerial, serta akses ke pasar internasional yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik. Selain itu, PMA berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1. 4
Penanaman Modal Asing (PMA) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023
(juta US\$)

Berdasarkan grafik di atas yang menampilkan perkembangan penanaman modal asing (PMA) di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya variasi yang cukup mencolok antarprovinsi maupun antar tahun. Jawa Barat secara konsisten mencatatkan nilai PMA tertinggi dibandingkan

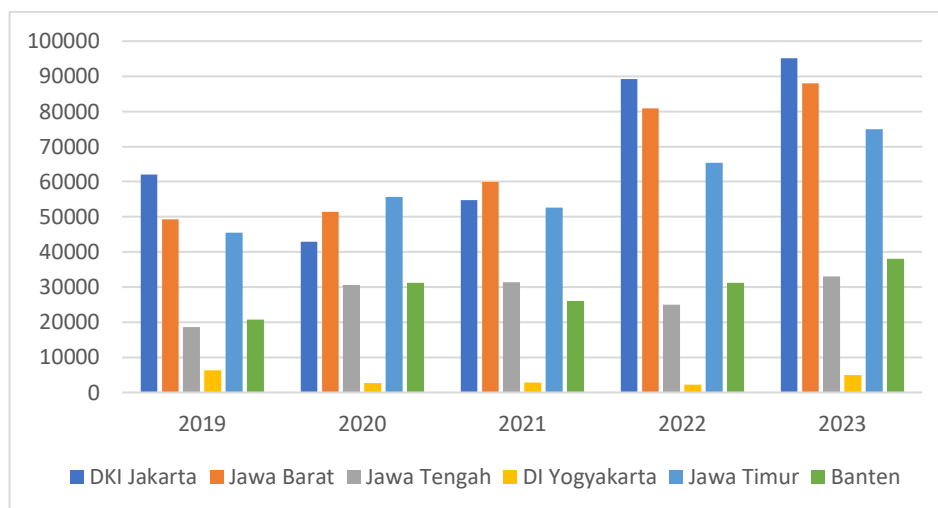
provinsi lainnya, bahkan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023. DKI Jakarta dan Banten juga menunjukkan tren peningkatan PMA, meskipun nilainya masih berada di bawah Jawa Barat. Sementara itu, provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta memiliki nilai PMA yang relatif lebih rendah dan pertumbuhannya cenderung stagnan atau meningkat secara perlahan.

Distribusi PMA yang tidak merata ini menunjukkan bahwa sebagian besar investasi asing masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu, terutama di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa, di mana wilayah dengan PMA tinggi cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah dengan PMA yang rendah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada perbedaan kesempatan kerja, pengembangan infrastruktur, serta inovasi teknologi di masing-masing provinsi.

Yuliani et al. (2023) menyatakan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Manihuruk et al. (2024) juga menyatakan bahwa PMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, PMA menciptakan peluang investasi baru yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti manufaktur, infrastruktur, dan teknologi. Dengan adanya investasi asing, negara dapat mengalami peningkatan produksi dan produktivitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB.

Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan ini melibatkan penggunaan modal yang berasal dari dalam negeri oleh warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, maupun pemerintah untuk menjalankan usaha di wilayah nasional.

Penanaman modal dalam negeri tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi pengembangan usaha, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1. 5
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 6 Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)

Berdasarkan grafik yang menampilkan perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan antarprovinsi. DKI Jakarta dan Jawa Barat secara konsisten menjadi dua provinsi dengan nilai PMDN tertinggi. Pada tahun 2022 dan 2023, kedua provinsi tersebut mengalami lonjakan nilai PMDN yang sangat mencolok, sehingga semakin memperlebar jarak dengan provinsi lainnya. Jawa Timur menempati posisi ketiga dengan tren peningkatan yang stabil, sedangkan Jawa Tengah dan Banten menunjukkan nilai PMDN yang relatif kecil. DI Yogyakarta berada pada posisi terendah sepanjang periode

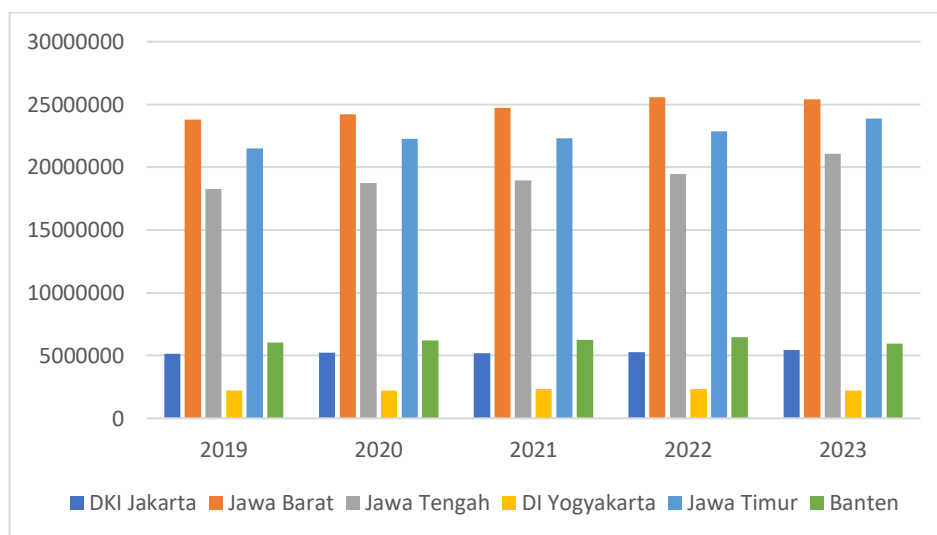
pengamatan, dengan nilai PMDN yang cenderung stagnan dan tidak mengalami perubahan signifikan.

Distribusi PMDN yang tidak merata di Pulau Jawa menunjukkan bahwa investasi domestik masih terpusat pada wilayah-wilayah tertentu, khususnya DKI Jakarta dan Jawa Barat. Konsentrasi investasi ini berpotensi memperkuat dominasi ekonomi di kedua provinsi tersebut, sementara provinsi lain menghadapi tantangan dalam menarik investasi domestik. Kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Muryanto et al. (2022) dan Widyastuti & Nugraha (2021) menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aliran modal dari dalam negeri, kegiatan produksi dapat ditingkatkan, sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, PMDN juga berkontribusi dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas industri dan infrastruktur, yang pada gilirannya mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, salah satunya adalah kondisi demografi dan dinamika populasi usia produktif. Kelompok penduduk yang berada dalam usia kerja memiliki peran strategis dalam menentukan potensi pertumbuhan ekonomi, karena mereka merupakan sumber utama tenaga yang dapat berkontribusi pada aktivitas produksi dan konsumsi. Selain itu, perubahan jumlah dan kualitas angkatan kerja dapat

mempengaruhi produktivitas serta kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber dayanya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kunci yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, yang dikenal sebagai pusat perekonomian Indonesia. Dengan lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di pulau ini, potensi sumber daya manusia yang tersedia sangat besar dan beragam.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1. 6

Angkatan Kerja 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (ribu jiwa)

Berdasarkan grafik jumlah angkatan kerja di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2019 hingga 2023 di atas, terlihat bahwa Jawa Barat secara konsisten memiliki jumlah angkatan kerja terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Setiap tahunnya, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat terus meningkat, bahkan selisihnya cukup jauh dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Jawa Timur dan Jawa Tengah juga menunjukkan angka angkatan kerja yang tinggi dan stabil, dengan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki jumlah angkatan kerja yang lebih kecil dibandingkan tiga provinsi

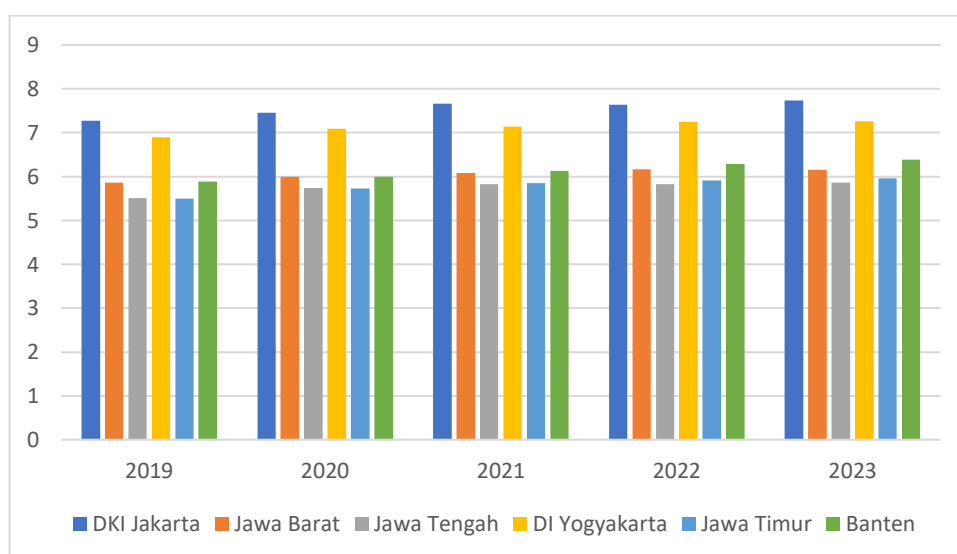
utama tersebut, namun tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Banten berada di posisi menengah dengan jumlah angkatan kerja yang relatif stabil, sedangkan DI Yogyakarta memiliki angka angkatan kerja terendah dan cenderung stagnan selama lima tahun terakhir.

Kondisi ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk usia produktif di beberapa provinsi utama, yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja di wilayah-wilayah tertentu juga menuntut tersedianya lapangan kerja yang memadai agar potensi tenaga kerja tersebut dapat terserap secara optimal. Jika tidak diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja yang cukup, peningkatan jumlah angkatan kerja justru dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan.

Prasetya (2023) dan Saskia & Yusnida (2022) menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketika tenaga kerja meningkat di suatu daerah berarti meningkat pula pendapatan per kapita dan tingkat konsumsi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besaran output suatu kegiatan perekonomian dan dikatakan sebagai modal penggerak roda pembangunan. sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif maka akan menghasilkan output yang tinggi pula yang akan mempengaruhi PDRB per kapita.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi. Inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong

terciptanya efisiensi, mempercepat arus data, serta membuka peluang baru di sektor ekonomi dan sosial. Transformasi digital yang semakin pesat juga menuntut adanya adaptasi dari berbagai pihak agar dapat memanfaatkan potensi teknologi secara optimal. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pemanfaatan teknologi yang merata dan berkelanjutan diyakini mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru yang lebih inovatif.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1. 7

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (persen)

Berdasarkan grafik di atas yang menampilkan perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2019 hingga 2023, terlihat bahwa DKI Jakarta secara konsisten memiliki nilai IPTIK tertinggi setiap tahunnya. Nilai IPTIK DKI Jakarta terus mengalami kenaikan, dari sekitar 7,2 pada tahun 2019 hingga mendekati 7,7 pada tahun 2023. DI Yogyakarta juga menonjol dengan nilai IPTIK yang relatif

tinggi dan stabil, sedikit di bawah DKI Jakarta, serta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Jawa Timur dan Banten berada pada posisi menengah dengan nilai IPTIK yang juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tidak setinggi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Sementara itu, Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki nilai IPTIK yang lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, namun tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama lima tahun terakhir.

Pola yang terlihat pada grafik ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemajuan dan pemerataan teknologi informasi dan komunikasi antarprovinsi di Pulau Jawa. Wilayah dengan nilai IPTIK yang tinggi, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, cenderung memiliki infrastruktur teknologi yang lebih baik, akses informasi yang lebih luas, serta tingkat literasi digital yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan inovatif di wilayah tersebut. Sementara itu, provinsi dengan nilai IPTIK yang lebih rendah perlu terus meningkatkan pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi agar tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi digital. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperluas akses pasar. Namun, belum meratanya kemajuan teknologi di seluruh provinsi dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Alifia & Andrianus (2024) menyatakan bahwa IP-TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan efisiensi proses produksi, memperluas akses

pasar, serta mempercepat arus informasi dan inovasi di berbagai sektor ekonomi. Peningkatan IP-TIK menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi dan kemampuan pemanfaatan teknologi di suatu wilayah semakin berkembang, sehingga mendorong produktivitas dan daya saing daerah tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor TIK, yang pada gilirannya memperkuat kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan belum ada yang meneliti variabel PMA, PMDN, angkatan kerja dan IP-TIK terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2019-2023 secara bersama-sama. Penelitian ini memfokuskan pada analisis komprehensif mengenai interaksi antara keempat variabel tersebut dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana PMA, PMDN, angkatan kerja dan IP-TIK berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Pulau Jawa. Penulis menyadari bahwa masih ada gap dalam penelitian ini, maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dan menjadi kontribusi ilmiah dalam menambah pengetahuan dan wawasan baru. serta menjadi gambaran untuk langkah pemerintah daerah kedepannya dalam hal membuat kebijakan atau pembangunan yang lebih baik. Diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Pulau Jawa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi penelitian selanjutnya terkait penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2019- 2023 ataupun dengan topik yang berhubungan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa diantaranya yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu publikasi laporan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja, dan indeks pembangunan teknologi informasi dan

